

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 43/PUU-XIII/2015**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

**KUMALA KURNIAWATI
NIM : 201510380211014**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2020**

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 43/PUU-XIII/2015**

Diajukan oleh :

**KUMALA KURNIAWATI
201510380211014**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at, 11 September 2020**

Pembimbing Utama

Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H.



Dr. Ashraf In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

KUMALA KURNIAWATI

201510380211014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Jum'at, 11 September 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H.
Sekretaris	: Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D.
Penguji I	: Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.
Penguji II	: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perogram Magister Ilmu Hukum ini dengan judul :

“Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Bidang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015”.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai rangkaian kegiatan akademik lainnya dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Rampungnya penyusunan tugas akhir tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing dan memberi motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum, terimakasih banyak atas ilmu dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Mohon maaf bila ada ucapan, sikap, dan perilaku yang tidak berkenan dari penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang ini;
6. Orang tua penulis, terimakasih banyak atas segala do'a dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis sebagai anak;
7. Seluruh staff bidang administrasi di Direktorat Program Pascasarjana, Badan Administrasi Akademik, Badan Administrasi Keuangan, dan seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. Terimakasih atas semua

keramahan dan bantuan dibidang proses administrasi serta pengadaan bahan literasi.

Akhir kata, semoga budi baik Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan amal terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa akan ada berbagai pendapat pro dan kontra dari para pembaca tesis yang penulis susun ini. Baik dari sisi penyajian, penyusunan, dan/atau pembahasannya, hal itu tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa dan sebagai catatan, bahwa semua yang penulis susun dalam penelitian tesis ini tidak ada tendensi kepada pihak manapun. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat pihak-pihak yang kurang setuju atau bahkan tidak setuju dengan pembahasan yang penulis sampaikan dalam karya tulis ini dan semoga karya tesis ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akademik dan praktek ilmu hukum berapapun kecilnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT serta selamat di dunia dan di akhirat. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Singosari, 12 Agustus 2020

Penulis,

Kumala Kurniawati, S.HI.

NIM. 201510380211014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	0
Halaman Pengesahan	i
Halaman Daftar Penguji.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Surat Pernyataan	vii
Abstrak.....	1
Abstract.....	2
I. Pendahuluan	3
II. Rumusan Masalah	7
III. Tinjauan Pustaka	
Teori Kekuasaan Negara.....	7
Teori Perundang-undangan Indonesia	11
Independensi Kekuasaan Kehakiman	12
IV. Metodologi Penelitian	
Jenis dan metode pendekatan penelitian	13
Sumber bahan hukum	14
Teknik Pengumpulan bahan hukum	14
Teknik analisa bahan hukum	15
V. Pembahasan	
1. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Komisi Yudisial	15
2. Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman.....	43
VI. Kesimpulan.....	46
VII. Saran.....	47
Daftar Pustaka.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel Kewenangan Pengangkatan Hakim dari beberapa UU	23
--	----



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **KUMALA KURNIAWATI**
NIM : **201510380211014**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

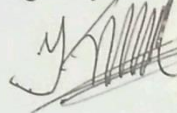
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIII/2015** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Agustus 2020

Yang menyatakan,



KUMALA KURNIAWATI



ABSTRAK

Nama : KUMALA KURNIAWATI
E-mail : Kumala.kurniawati@gmail.com
NIM : 201510380211014
Judul : **REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.
43/PUU-XIII/2015**

Pembimbing : 1. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H.
NIDN. 0013126302
2. Bapak Mokh, Najih, S.H., M.H., Ph.D
NIDN.0017056501

Komisi Yudisial sebagai lembaga non-yudisial dalam lingkup kekuasaan kehakiman termasuk lembaga yang kewenangannya sering diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu terkait dengan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Penelitian ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim peradilan tingkat pertama yang oleh pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) apa implikasi hukum terhadap kewenangan komisi yudisial setelah munculnya putusan tersebut dan (2) Bagaimana rekonstruksi kewenangan komisi yudisial setelah adanya putusan tersebut. Penelitian ini yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan studi komparatif kemudian untuk teknik analisa menggunakan teknik penafsiran letterlijk atau harfiah dan penafsiran gramatikal. Dari sisi pembahasan diketahui bahwa kewenangan pada pasal-pasal *a quo* adalah bersifat *open legal policy* dari legislator, dari secara konstitusional pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, kemudian dari sisi studi komparatif beragamnya situasi kekuasaan kehakiman masing-masing negara belum menunjukkan makna independensi lembaga yang murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* bersifat *open legal policy* sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945; *Kedua*, Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dapat dilakukan melalui perubahan muatan materi Pasal 24B ayat (1) dan penambahan wewenang komisi yudisial pada undang-undang. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya perubahan pada muatan materi undang-undang terkait kewenangan Komisi Yudisial disemua undang-undang yang ada di lingkup kekuasaan kehakiman.

Kata kunci : Komisi Yudisial, Kewenangan, Pengangkatan Hakim

ABSTRACT

Name : KUMALA KURNIAWATI
E-mail : kumala.kurniawati@gmail.com
NIM : 201510380211014
Title : **RECONSTRUCTION OF THE AUTHORITY OF THE JUDICIAL COMMISSION IN THE FIELD OF JUDICIAL POWER AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER. 43/PUU-XIII/2015**
Advisors : 1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H.
NIDN.0013126302
2. Mokh, Najih, S.H., M.H., Ph.D
NIDN. 0017056501

The Judicial Commission as a non-judicial institution within the scope of judicial power is an institution whose authority is often submitted for judicial review to the Constitutional Court. This is of course related to the authority this institution has. This research discusses the decision of the Constitutional Court on the authority of the Judicial Commission in the selection process for judicial judges at the first level which the applicant deems contrary to the 1945 Constitution. How is the reconstruction of the authority of the judicial commission after this decision? This juridical normative research uses the statutory approach method, the case approach, and the comparative study approach. Then for the analysis technique uses the literal or literal interpretation technique and the grammatical interpretation. From the discussion side, it is known that the authority in the a quo articles is an open legal policy from the legislator, from the constitutionally the a quo articles are contradictory to the 1945 Constitution, then from the side of a comparative study, the various situations of judicial power in each country have not shown the meaning of independence. pure institution. The conclusions of this study are First, the implication of the Constitutional Court decision states that the a quo articles are open legal policy so that they do not have binding legal force and are against the 1945 Constitution; Second, the reconstruction of the authority of the Judicial Commission can be carried out by changing the material content of Article 24B paragraph (1) and adding the authority of the judicial commission to the law. The suggestion from this research is that there is a need for changes to the material content of the law related to the authority of the Judicial Commission in all laws that are within the scope of judicial power.

Keywords: Judicial Commission, Authority, Appointment of Judges

I. Pendahuluan

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan cukup besar dalam struktur kelembagaan Indonesia. Salah satunya dalam bidang kekuasaan kehakiman, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya adalah pelaksana kuasa kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sebelum reformasi berlangsung termaktub pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab II Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan empat lembaga peradilan yang berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer¹.

Sesudah reformasi tahun 1998 perubahan yang terjadi pada Kekuasaan Kehakiman Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 / 1999 yang merubah undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana isi dari peraturan tersebut secara garis besar adalah mengenai penyatuatapan badan-badan peradilan dari aspek administratif, organisatoris, dan finansial kepada Mahkamah Agung².

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan dua lembaga baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 tahap ke-3 tahun 2001. Dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 buku/jilid ke-6, disebutkan bahwa pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi mulai bergulir pada pembahasan kedua setelah pembahasan pertama mengenai kekuasaan kehakiman secara umum dan Mahkamah Agung selesai³. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bukti pentingnya kontrol dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara sekaligus menegaskan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dimana Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta empat badan

¹ Disarikan dari UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10

² Disarikan dari UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 dan Pasal 11A.

³ Disarikan dari Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 jilid ke-6, hal 441

peradilan dibawahnya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Kedudukan dua lembaga tersebut adalah sejajar, dimana Mahkamah Konstitusi yang diletakkan dalam Pasal 24C memiliki tugas untuk mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, membuat keputusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden yang diajukan DPR⁴.

Mengenai Komisi Yudisial, lembaga ini juga ditetapkan pada amandemen UUD 1945 tahap ke-3. Pada masa sidang tahun 1999 di fraksi-fraksi yang tergabung dalam PAH III BP MPR telah mengemuka perihal perlunya pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman walau waktu itu belum muncul nomenklatur ‘Komisi Yudisial’⁵. Nomenklatur ‘Komisi Yudisial’ muncul pada masa sidang perubahan kedua tahun 2000 dimana anggota-anggota fraksi yang dulu tergabung dalam PAH III BP MPR melanjutkan tugas pada kepanitiaan yang baru yakni pada PAH I BP MPR⁶. Rumusan akhir dari rapat PAH I BP MPR adalah pengambilalihan hak mencalonkan hakim agung yang dulu dimiliki oleh DPR kepada Komisi Yudisial dengan kalimat yang berbeda yakni KY bertugas mengusulkan calon hakim agung, memiliki tugas lain dalam kapasitas menjaga dan menegakkan kehormatan / muruah hakim namun tugas ini bukan untuk mencampuri urusan teknis yudisial⁷.

Perlu diketahui bahwa dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman belum dimuatnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pemuatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dimuat pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi dimana undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 yang kemudian dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa MA dan MK adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berada

⁴ Disarikan dari Naskah Komprehensif buku ke-6, hal 592-595

⁵ Disarikan dari Naskah Komprehensif buku ke-6, hal 597

⁶ Disarikan dari Naskah Komprehensif buku ke-6, hal 603

⁷ Disarikan dari Naskah Komprehensif buku ke-6, hal 710

dalam lingkup kekuasaan kehakiman⁸. Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 termaktub dalam Pasal 24C dan dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 termaktub dalam Pasal 24B dan dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana dirubah pada UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam perkembangan hubungan antar lembaga negara, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya sering diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi yang memang salah satu wewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Uji materiil terhadap kewenangan Komisi Yudisial yang pertama kali adalah pada tahun 2006 dengan nomor register perkara No. 005/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh 31 Hakim Agung. Pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur tentang tugas Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dan penjatuhan sanksi. Dimana para pemohon dalam petitumnya meminta agar mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan secara seluruhnya dengan dalil bahwa ketentuan-ketentuan yang diajukan *judicial review* bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bersifat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian pada tahun 2015 pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia mengajukan uji materiil terhadap tiga undang-undang badan peradilan yang disahkan pada tahun 2009. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2009 terdapat empat undang-undang yang disahkan untuk lingkup kekuasaan kehakiman yakni:

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang statusnya adalah mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (perubahan pertama termaktub dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004).

⁸ Disarikan dari Bab I Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama (perubahan pertama termaktub dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
4. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan pertama termaktub dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara).

Sebagaimana telah sedikit dibahas pada paragraf diatas bahwa terdapat 3 paket undang-undang yang diajukan uji materiil, dalam hal ini pada UU Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara diajukan uji materiil oleh ikatan hakim indonesia, karena pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No.51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang pada intinya pada ayat (2) yang menyatakan bahwa proses pengangkatan hakim pada peradilan tingkat I yang dilakukan bersama oleh KY dan MA dan pada ayat (3) yang menyatakan bahwa peraturan selanjutnya perihal proses seleksi diatur hakim ditetapkan oleh MA dan KY adalah bertentangan dengan UUD 1945⁹. Yang mendasari petitum tersebut adalah menurut pemohon hak konstitusionalnya sebagai hakim agung dan panitera sekaligus pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut diatas.

Dari peristiwa tersebut diatas tentu sangat disayangkan karena undang-undang sebagai kepanjangan tangan dari UUD 1945 yang menjadi tumpuan gerak Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat sambutan baik dari para pihak yang mengajukan uji materiil karena apapun putusan yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi putusan yang bersifat final dan berpengaruh kepada undang-undang yang diajukan uji materiil dan juga tentu kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang kewenangannya tertera pada undang-undang yang diuji materiilkan. Dari pemaparan tersebut perlu diketahui implikasi dari

⁹ Disarikan dari putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 hal 14-19

pengujian undang-undang tersebut serta bagaimana rekonstruksi ketentuan kewenangan Komisi Yudisial yang ideal pasca putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 sehingga judul dari penelitian ini adalah **Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Bidang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015**

II. Rumusan masalah

1. Apa implikasi hukum terhadap kewenangan Komisi Yudisial setelah keluarnya putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial setelah adanya putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 ?

III. Tinjauan Pustaka

A. Teori Kekuasaan Negara.

Teori tentang kekuasaan negara memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu kekuasaan yang diperoleh orang tertentu dan yang kedua yaitu kekuasaan yang menguasai orang sehingga orang yang dikuasai itu akan tunduk pada kekuasaan tersebut. Inti pemahaman dari teori kekuasaan yaitu legitimasi atas kekuasaan dan penerimaan pembatasan dan tekanan-tekanan dari sebuah kekuasaan. Legitimasi sangatlah penting sebagai dasar dari kekuasaan karena tanpa adanya legitimasi maka tindakan pribadi atau tindakan secara kelembagaan negara tidak dapat dilakukan¹⁰.

Menurut Ossip K dan Flechtheim (1952) sebagaimana dikutip Beddy Irawan Maksadi, kekuasaan / *power* dibagi menjadi dua yakni kekuasaan vertikal yang ditujukan kepada negara dan kekuasaan struktural yakni kekuasaan yang berada didalam negara. Disisi lain, Gabriel A. Almon membagi kekuasaan dari pendekatan struktural – fungsional yaitu kekuasaan negara yang ditujukan kepada negara yang identik dengan infra struktur politik dan kekuasaan didalam negara yang sama dengan suprastruktur politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Dahl sebagaimana dikutip Sri Soemantri bahwa supra struktur politik dan infra struktur politik merupakan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-

¹⁰ Samsul Wahidin. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007) hal 1-2

macam lembaga politik sehingga tercipta sistem politik. Supra struktur politik sendiri memiliki pengertian sebagai tata hubungan kekuasaan yang digunakan sebagai pembagi kekuasaan secara horizontal – fungsional, contoh dari supra struktur politik yakni pada lembaga formal eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Disisi lain, pengertian infra struktur politik adalah struktur politik informal diluar lembaga pemerintahan seperti contoh : partai politik, komunitas / lembaga kemasyarakatan¹¹.

Teori lain tentang kekuasaan negara dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *Two treatis of Government* (tahun 1690) John Locke membagi kekuasaan negara kedalam tiga macam kekuasaan yaitu, legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan federatif (kuasa hubungan luar negeri/diplomatik dengan negara lain). Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan John Locke, Montesquieu mengajukan teori *Trias Politica* dimana teori kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni legislatif (membentuk undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Konsep teori kekuasaan negara dari dua tokoh tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yakni sama-sama mengemukakan adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif kemudian perbedaannya yakni John Locke mengemukakan adanya kekuasaan federatif sedangkan Montesquieu mengemukakan adanya kekuasaan yudikatif. Bila dielaborasi lebih lanjut, John Locke memhami bahwa kekuasaan yudikatif masuk dalam kekuasaan eksekutif karena pelaksanaan peradilan sama dengan pelaksanaan undang-undang sedangkan kekuasaan yang berdiri sendiri adalah kekuasaan federatif. Kemudian kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu mencakup kekuasaan hubungan luar negeri karena hubungan luar negeri dianggap masuk dalam wilayah eksekutif sedangkan untuk kekuasaan yudikatif dikategorikan sebagai kekuasaan yang terpisah dari eksekutif dan berdiri sendiri¹².

Berkaitan dengan hal tersebut, negara menjadi wadah bagi rakyatnya untuk mencapai tujuan tertentu dan pada umumnya tujuan negara tertuang pada konstitusi. Oleh karena itu negara menjadi legitimasi / kuasa normatif untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan konstitusi melalui

¹¹ Beddy Irawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.2012) hal 82-83

¹² *Ibid* hal 92-93

pemerintah sebagai organ negara yang juga berperan dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan yang bersifat internal yaitu hal-hal yang menyangkut pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan konstitusi sedangkan permasalahan yang bersifat eksternal adalah hal-hal yang menyangkut kegiatan negara secara bilateral, multilateral, maupun kerjasama lain dalam ranah internasional.

Lebih lanjut mengenai legitimasi kekuasaan, dibagi menjadi dua yakni atributif dan derivatif. Dua jenis legitimasi kekuasaan itu membawa konsekuensi tersendiri dalam penafsiran kekuasaan yang dimiliki negara dan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas kenegaraan guna mencapai tujuan konstitusi negara. Pembentukan kekuasaan adalah legitimasi kekuasaan atributif sehingga yang awalnya kekuasaan itu tidak ada menjadi ada, agar tidak terjadi multi interpretasi maka pada umumnya kekuasaan atributif ini dibatasi dengan peraturan-peraturan normatif sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan derivatif adalah pengalihan kekuasaan atau pendistribusian kekuasaan pada pihak lain dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara, legitimasi kekuasaan derivatif ini dapat berupa hubungan lembaga negara yang bersifat struktural dan hubungan lembaga negara yang fungsional¹³.

Pendapat lain tentang kekuasaan negara diajukan oleh Prof. Jimly Assidique, menurut beliau pemisahan kekuasaan dibagi menjadi dua yakni yang bersifat horizontal dan yang bersifat vertikal. Pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal adalah pengaturan hubungan lembaga negara yang dipisahkan kedalam fungsi lembaga negara yang sama kedudukan kelembagaannya sehingga saling mengimbangi. Pemisahan kekuasaan negara yang bersifat vertikal adalah pengaturan hubungan lembaga negara dari lembaga tinggi negara ke lembaga negara dibawahnya. Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia menggunakan metode pemisahan kekuasaan yang bersifat vertikal sehingga pada waktu itu pemaknaan kedaulatan ditangan rakyat berpusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang mendistribusikan fungsi-fungsi tertentu kepada

¹³ Samsul Wahidin. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007) hal 6-8

lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, dsb.

Perimbangan kekuasaan dan kesederajatan merupakan prinsip pemisahan kekuasaan yang bersifat vertikal dan tidak primer. Oleh sebab itu dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur pemisahan kekuasaan negara dengan tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, dimana fungsi lembaga legislatif pada saat itu lebih sebagai lembaga pengawas. Namun setelah amandemen UUD 1945, terdapat peralihan penggunaan metode pemisahan kekuasaan negara dari yang semula menggunakan pemisahan kekuasaan negara yang bersifat vertikal menjadi menggunakan metode pemisahan kekuasaan negara yang bersifat horizontal seperti yang tersirat pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (5) setelah diamandemen. Penggunaan prinsip pemisahan kekuasaan yang akan digunakan suatu negara sangat penting ditentukan karena berpengaruh pada kinerja dan hubungan lembaga negara. Prinsip pemisahan kekuasaan adalah *check and balances*, penggunaan tersebut agar ada batasan-batasan kekuasaan sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan yang bisa saja dilakukan oleh pemegang kekuasaan sekaligus sebagai pelaksanaan tugas utama konstitusi dan ciri konstitusionalisme¹⁴.

Kekuasaan negara berefek pada kewenangan dimana kekuasaan dapat diperoleh melalui dua jalur yakni atribusi dan derivatif. Kekuasaan yang bersumber dari konstitusi melalui asas pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara yang didapat dari jalur atributif. Kemudian yang disebut dengan derivatif adalah kekuasaan yang berasal dari pelimpahan kekuasaan dengan cara delegasi dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon istilah wewenang/kewenangan sering disamakan dengan istilah belanda *bevoegheid*, namun perlu dijelaskan bahwa konsep *bevoegheid* digunakan pada ranah hukum publik dan hukum privat sedangkan konsep wewenang/kewenangan hanya digunakan dalam ranah hukum publik. Sejalan dengan hal tersebut F.A.M Stroink memaparkan bahwa dalam konsep hukum publik wewenang masuk dalam kategori kekuasaan hukum dan merupakan inti dalam hukum tata negara, sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan dan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika.2010) hal 137

masuk dalam konsep hukum publik. Setidaknya terdapat tiga unsur wewenang dalam konsep hukum publik yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum¹⁵.

Terkait dengan hal tersebut, maka tindakan pemerintahan haruslah bertumpu pada penggunaan kewenangan yang sah yang dapat diperoleh dari tiga sumber kewenangan yakni ¹⁶:

- 1) Atribusi : adalah kekuasaan negara yang didapat dari konstitusi/undang-undang dasar. H.D. Van Wijk menyatakan pendapat bahwa “atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah”
- 2) Delegasi : “Menurut H.D. Van Wijk delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada suatu badan atau pejabat lain. Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi.”
- 3) Mandat : apabila pejabat yang berwenang tidak sanggup melakukan suatu tugas sendiri dan dilimpahkan ke badan atau staff bawahannya maka itu sebut mandat terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang memberikan mandat tersebut dari jenis kewenangan atribusi maupun delegasi. Dari penjelasan H.D. Van Wijk arti mandat yaitu badan pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dilakukan oleh badan lain atas namanya. Dalam hal mandat, pemberi mandat (mandans) tetap memiliki wewenang untuk melaksanakan kewenangannya tersebut dan mandans tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan penerima mandat (mandataris).

B. Teori Perundang-undangan Indonesia.

Peraturan perundang-undangan adalah tiap-tiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan prosedur yang berlaku¹⁷. Bentuk peraturan perundang-undangan dari sisi substansi

¹⁵ Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. (Malang: Setara Press.2012) hal 74-75

¹⁶ Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. (Malang: Setara Press.2012) hal 126-128

¹⁷ Bagir Manan dalam Marojahan.JS Panjaitan. *Pembentukan dan perubahan UUD 1945 : sebagai bahan ajar ilmu perundang-undangan dan perancangan undang-undang*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2017). hal 105

yang berasal dari norma hukum itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu peraturan perundang-undangan dan keputusan/ penetapan/ ketetapan dimana hal yang membedakan antara peraturan dengan keputusan/penetapan/ketetapan dari segi jangkauan keberlakuannya, ke-konkrit-an perbuatan yang diatur dan jangka waktu keberlakuannya¹⁸. Berkaitan dengan hal tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menggunakan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa norma-norma hukum disusun secara berjenjang dan berlapis serta peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kemudian norma hukum yang ada pada peraturan yang lebih rendah harus berdasarkan norma hukum peraturan yang lebih tinggi hingga nantinya mengacu pada norma hukum tertinggi yang disebut dengan norma dasar, selain itu Hans Nawiasky menambahkan bahwa pada norma hukum juga berkelompok dimana pengelompokan itu terdiri dari norma fundamental negara, aturan dasar negara, undang-undang formal, dan aturan pelaksana¹⁹.

C. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Pemaknaan independensi lembaga negara secara implisit didefinisikan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No.005/PUU-IV/2006 yakni pelaksanaan kewenangan dan pengambilan keputusan, tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan lain²⁰.

Ciri independensi lembaga peradilan menurut Alexis de Tosqueville sebagaimana ditulis oleh Daniel S. Lev dan dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya yang berjudul lembaga negara independen yaitu : kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana peradilan yang bekerja ketika ada pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran hak warga negara tanpa ada tekanan dari pihak manapun, fungsi lembaga peradilan hanya berjalan bila ada kasus pelanggaran khusus yakni apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak menggunakan peraturan yang berlaku umum, namun menggunakan peraturan yang berlaku khusus mengatur

¹⁸ Sirajuddin dkk. *Legislative Drafting*. (Malang: Setara Press.2016) hal 38-39

¹⁹ *Ibid* hal 39-43

²⁰ Disarikan dari Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 hal 192

tentang hukum pelanggaran tersebut, kekuasaan kehakiman yang berfungsi apabila terdapat sengketa hukumnya²¹.

Ahli hukum Belanda, **Franken** memaparkan empat bentuk independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana berikut ini²² :

1. Independensi konstitusional (*Contitutionelen onafhankelijkheid*), adalah independensi yang dikaitkan dengan doktrin Trias politica yang menganut pembagian kekuasaan dimana lembaga pemegang kuasa kehakiman harus bebas dari pengaruh politik;
2. Independensi fungsional (*Zakelijke of functionele onafhankelijkheid*), adalah independensi hakim dalam memutus suatu sengketa yang diadilinya hingga putusan, hal ini berarti hakim melakukan kebebasannya dalam menafsirkan aturan undang-undang apabila undang-undang terkait dinilai tidak memberikan aturan yang jelas atau belum memberikan aturan terhadap sengketa yang diadili;
3. Independensi personal hakim (*Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*), adalah kebebasan hakim sebagai individu ketika menghadapi suatu sengketa;
4. Independensi praktis yang nyata (*Praktische of feitelijke onafhankelijkheid*), yaitu imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim saat mengadili suatu perkara, hakim dituntut untuk selalu mengetahui perkembangan dunia hukum dimasyarakat akan tetapi hal itu menjadi pintu bagi hakim untuk mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak luar dalam mengadili perkara. Hakim harus menyaring segala informasi perkembangan hukum yang ada.

IV. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dimana bahan utama dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 dan undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara

²¹ Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2016, cet ke-1) hal 103

²² J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Kesaint Blanc.2008) hal 131-132

dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah isu hukum dalam dogmatik hukum dimana ciri dari isu hukum dalam dogmatik hukum adalah adanya perbedaan penafsiran oleh para pihak atau bahkan saling berseberangan atas penafsiran suatu teks peraturan, terjadinya kekosongan hukum, dan adanya perbedaan penafsiran atas ketentuan yang di uji materiil-kan²³. Perbedaan penafsiran teks ketentuan peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan penafsiran tentang beberapa ketentuan yang ada mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim yang termaktub dalam undang-undang Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni menganalisa regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, pendekatan kasus dimana fokus analisa pada dasar pertimbangan putusan hukum hakim dalam memutuskan perkara, dan pendekatan komparatif adalah studi perbandingan regulasi dan dalam penelitian ini untuk membandingkan aturan komisi yudisial yang berada di Indonesia dan negara lain yang sama-sama menganut paham *trias politica*²⁴.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum memiliki dua jenis sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Umum No. 49 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015. Untuk sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum dan jurnal hukum²⁵.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum kemudian mempelajarinya untuk

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2014 cet ke 09) hal 105

²⁴ *Ibid* hal 133

²⁵ *Ibid* hal 181

dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, UUD 1945, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Umum No. 49 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009, undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang membahas kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, dan komisi yudisial.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum. Ada banyak metode penafsiran hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun dalam tesis ini hanya menggunakan beberapa metode penafsiran hukum yang sesuai dengan topik bahasan seperti²⁶ metode penafsiran letterlijk atau harfiah yang berfokus pada makna kata yang tertulis, metode penafsiran bahasa atau gramatikal dimana fokus penafsiran pada teks yang mengandung aturan hukum, metode penafsiran historis atau sejarah dari lembaga dan aturan yang menaunginya.

V. Pembahasan

1. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Komisi Yudisial

Implikasi putusan yang akan dibahas dalam penelitian ini dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti diketahui bahwa dalam putusan uji materiil dengan register putusan No. 43/PUU-XIII/2015 yang diujikan adalah mengenai seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon menguji materiilkan pada frasa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri/agama/tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan pada frasa ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana termaktub pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49

²⁶ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada.2014) hal 220-224

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan terhadap Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan keadilan dan mengimplementasikan hukum, Pasal 24B ayat (1) yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, dan Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan tentang hak dasar manusia untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Lalu apa dan bagaimanakah analisa pengaturan rekrutmen hakim beserta implikasi yang ada pada peraturan-peraturan tersebut diatas pasca putusan MK No.43/PUU-XIII/2015, disinilah penulis akan membahasnya secara bertahap, sudut pandang yang pertama adalah dari *ratio legis* undang-undang (pendekatan perundang-undangan), kedua dari *ratio decidendi* putusan MK (pendekatan kasus), dan studi di negara yang juga memiliki lembaga non yudisial dalam lingkup kekuasaan kehakimannya (pendekatan komparatif), sebagaimana pemaparan berikut ini:

A) Rekrutmen hakim dalam perkembangan undang-undang kekuasaan kehakiman Indonesia.

Rekrutmen hakim di Indonesia yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejak setelah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan kehakiman tertulis pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dalam tataran undang-undang pada masa orde lama, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang No. 19 /1964 yang pada masa itu dibarengi dengan pengesahan undang-undang tentang pengadilan umum dan mahkamah agung No. 13 Tahun 1965 yang mencabut keberlakuan undang-undang No. 1 Tahun 1950, hal itu dilakukan karena pada saat itu ketua MA juga menjabat sebagai menteri koordinator hukum dan dalam negeri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Mengenai sistem rekrutmen diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU No.13 Tahun 1965 yang mengatur tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dimana kuasa mengangkat hakim agung tidak lagi berpusat pada Presiden melainkan masuknya DPR sebagai pengusul

calon hakim agung yang akan diangkat oleh Presiden²⁷. *Ratio legis* dari undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 19/1964 adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 24 undang-undang dasar, meletakkan pondasi bagi penyelenggaraan peradilan, dan mengatur hubungan antara peradilan dan para pencari peradilan²⁸. Sedangkan *ratio legis* dari undang-undang Mahkamah Agung No. 13/ 1965 tentang pengadilan dalam peradilan umum dan mahkamah agung adalah untuk melaksanakan ketentuan kekuasaan kehakiman dari undang-undang nomor 19/1965 mengenai susunan, kekuasaan, kedudukan, dan administrasi para hakim dan badan peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat tertinggi yakni mahkamah agung²⁹.

Pada masa orde baru, bergantinya rezim orde lama ke orde baru membawa perubahan yang cukup signifikan pada dunia peradilan Indonesia. Dirubahnya UU 19 / 1964 yang mengatur kekuasaan kehakiman ke UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman, *ratio legis* dari undang-undang yang baru ini adalah karena undang-undang tersebut bukan pelaksana murni dari Pasal 24 serta bertentangan dengan undang-undang dasar yang kemudian dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yakni pelaksanaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang termaktub pada Pasal 19 undang-undang nomor 19 / 1964 yang menyatakan bahwa Presiden dalam beberapa hal dapat turut campur dalam soal-soal Pengadilan. Perubahan undang-undang ini merupakan salah satu bentuk pemurnian dalam pelaksanaan undang-undang dasar seperti yang sudah diamanatkan dalam ketentuan MPRS No. XIX/MPRS/1966 juncto No. XXXIX/MPRS/1968 dimana pemerintah bersama dengan DPR GR melakukan peninjauan terhadap UU 19/1964 dengan kacamata ketentuan undang-undang nomor 6/1969 pada ketentuan Pasal 2 lampiran ketiga yang menghendaki adanya pergantian undang-undang³⁰.

²⁷ Prof. Saldi Isra. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2015), hal 36-38

²⁸ Disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum UU 19/1964 tentang kekuasaan kehakiman hal 1 dan hal 7

²⁹ Disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum UU 13/1965 tentang pengadilan dalam peradilan umum dan mahkamah agung hal 1 dan hal 26

³⁰ Disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum UU 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman hal 1 dan hal 9

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada masa orde baru pengaturan tentang mahkamah agung termaktub pada undang-undang nomor 14 / 1985. *Ratio legis* dari undang-undang tersebut adalah karena pada undang-undang nomor 13 / 1965 ketentuan yang mengatur tentang mahkamah agung sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 14 / 1970 serta guna melaksanakan undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut diperlukannya penetapan peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, dan kekuasaan mahkamah agung serta hukum acaranya. Dalam undang-undang yang baru juga dipaparkan lebih rinci tentang kekuasaan dan kewenangan mahkamah agung³¹. Selanjutnya, pada masa peradilan umum masa itu diatur dengan undang-undang nomor 2 / 1986 dimana *ratio legis* dari undang-undang ini adalah diakibatkannya undang-undang nomor 13/1965 yang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat undang-undang nomor 14/1970 dan juga pengaturan undang-undang nomor 6/1969 yang mengatur tentang tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai cara untuk pemurnian pelaksanaan undang-undang dasar serta untuk mewujudkan amanat undang-undang kekuasaan kehakiman yakni terwujudnya peradilan sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan maka gerak mahkamah agung yang mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 13/1965 perlu diganti³².

Kemudian *ratio legis* dari undang-undang peradilan agama pada masa orde baru didasari oleh beraneka ragamnya regulasi yang mendasari badan peradilan agama yang kemudian mengakibatkan beragam susunan, kedudukan, dan hukum acara peradilan agama perlu diselesaikan dengan tujuan terwujudnya kesatuan hukum badan peradilan agama pada sistem dan tata hukum nasional³³. Pada ketentuan peradilan tata usaha negara, *ratio legis* dari ketentuan undang-undang nomor 5 / 1986 adalah untuk menyelesaikan perselisihan, benturan kepentingan, atau

³¹ disarikan dari konsiderans undang-undang nomor 14/1985 tentang mahkamah agung.

³² disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, hal 1 dan hal 19

³³ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang peradilan agama nomor 7/1989 hal 1 dan hal 27

sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat yang berpotensi menghambat pembangunan nasional³⁴.

Kemudian terjadinya peristiwa reformasi tahun 1998, membawa perubahan dalam bidang kekuasaan kehakiman Indonesia karena perubahan dalam bidang kekuasaan kehakiman menjadi salah satu tuntutan reformasi yang harus direalisasikan. Terbentuknya mahkamah konstitusi dan komisi yudisial adalah bentuk perubahan komposisi lembaga negara yang berada dalam lingkup bidang kekuasaan kehakiman. Pasal 24B adalah dasar konstitusi dibentuknya komisi yudisial yang bertugas untuk melakukan pengusulan calon hakim agung kepada DPR dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian Pasal 24C yang menjadi dasar keberadaan mahkamah konstitusi yang memiliki beberapa tugas seperti mengadili undang-undang terhadap undang-undang dasar, mengadili dugaan pelanggaran Presiden yang diajukan oleh DPR, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangan diperoleh dari undang-undang dasar, dsb.

Perubahan undang-undang dasar tentu membawa pengaruh pada ketentuan turunan/peraturan yang berada dibawah undang-undang dasar yang dalam pembahasan ini adalah undang-undang. **Pada UU Kekuasaan Kehakiman**, *Ratio legis* dari undang-undang nomor 35 / 1999 adalah perlunya penyesuaian dalam pengorganisasian, pengadministrasian, dan finansial badan-badan peradilan seperti yang ditetapkan oleh MPR No. X/MPR/1998 mengenai pokok-pokok pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional³⁵. Setelah itu pada tahun 2004, undang-undang nomor 35/ 1999 dicabut dan digantikan oleh undang-undang nomor 4 / 2004, *ratio legis* dari undang-undang ini adalah diperlukan penyesuaian terhadap aturan kekuasaan kehakiman sebagai respon atas perubahan bab kekuasaan kehakiman dalam konstitusi yakni adanya perubahan struktur kelembagaan dengan adanya mahkamah konsitusi dan komisi yudisial³⁶. Kemudian pada tahun 2009 dibentuklah undang-undang pengganti dari UU nomor 4 / 2004,

³⁴ disarikan dari konsiderans undang-undang peradilan tata usaha negara nomor 2 / 1986, hal 1

³⁵ disarikan dari undang-undang nomor 35/1999 tentang perubahan kekuasaan kehakiman. hal 1 dan hal 3

³⁶ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang nomor 4 / 2004 tentang kekuasaan kehakiman, hal 1 dan hal 13.

ratio legis dari dibentuknya Undang-Undang No. 48 / 2009 tentang kekuasaan kehakiman³⁷ adalah untuk memenuhi amanat putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang salah satu amar putusannya adalah membatalkan keberlakuan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan ketentuan terkait pengawasan hakim pada UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.³⁸,

Pada undang-undang Mahkamah Agung. *Ratio legis* dari undang-undang nomor 5 / 2004 adalah pengaturan mahkamah agung pada undang-undang nomor 14 / 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut undang-undang dasar dan pada undang-undang ini memuat substansi pengaturan mahkamah agung seperti penegasan posisi mahkamah agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, beberapa syarat untuk diangkat menjadi hakim agung, dan pengaturan mengenai hukum acara³⁹. Perkembangannya kemudian pada tahun 2009 dilakukan perubahan kedua pada undang-undang mahkamah agung yakni UU No. 3 Tahun 2009 *Ratio legis* disahkannya undang-undang ini adalah karena UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* UU No. 5/2004 dalam bidang pengawasan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan dari perspektif ketatanegaraan. Berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap badan-badan peradilan dibawahnya namun Mahkamah Agung bukanlah pengawas tunggal karena ada Komisi Yudisial yang juga memiliki fungsi pengawasan berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945⁴⁰.

Pada bidang Peradilan umum, pasca reformasi juga terjadi perubahan aturan tentang peradilan umum yakni dengan disahkannya undang-undang nomor 8 / 2004 dimana *ratio legis* dari peraturan ini adalah pengaturan peradilan umum dalam undang-undang nomor 2 / 1986 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga diperlukan penyesuaian⁴¹. Kemudian tahun 2009, disahkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986

³⁷ disarikan dari bagian penjelasan umum UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, hal 16

³⁸ Disarikan dari Pasal 40 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, hal 10

³⁹ disarikan dari konsiderans undang-undang nomor 5 /2004 tentang mahkamah agung. hal 1 dan hal 11

⁴⁰ Disarikan dari Bagian penjelasan Undang-Undang No.3 / 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 14 / 1985 , hal 1 dan hal. 11-12

⁴¹ disarikan dari konsiderans undang-undnag nomor 8 / 2004. hal 1

tentang Peradilan Umum, dilatarbelakangi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 / 2004 yang membahas mengenai pengawasan hakim serta ketentuan terkait pengawasan hakim yang ada pada UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial⁴². Sedangkan untuk tugas rekrutmen hakim pada undang-undang ini tidak dibahas mengenai rekrutmen calon hakim agung melainkan hakim pada pengadilan tingkat pertama seperti yang dimuat pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) yang mana mengatur proses seleksi hakim pengadilan negeri oleh MA dan KY serta aturan lebih lanjut diatur oleh KY dan MA. Pasal inilah yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Pada Undang-Undang Peradilan Agama, pengaturan setelah reformasi tahun 1998 tertuang pada undang-undang nomor 3 / 2004, *ratio legis* dari undang-undang ini adalah pengaturan peradilan agama pada undang-undang 7 / 1989 dinilai belum mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian yakni dengan memperluas kewenangan peradilan agama yakni dalam bidang ekonomi syariah⁴³. Selanjutnya pada tahun 2009, dibentuk undang-undang yang merupakan perubahan kedua yakni UU No. 50 / 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 / 1989 tentang Peradilan Agama. *Ratio legis* dari disahkannya undang-undang ini adalah sebagai konsekuensi logis yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 yang bahwa Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 / 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawasan hakim dalam UU No. 22 / 2004 tentang komisi yudisial, bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu oleh mahkamah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, perubahan kedua dari undang-undang peradilan agama ini meletakkan dasar kebijakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan urusan peradilan agama, pengawasan teknis yudisial dan teknis yudisial seperti urusan administrasi, organisasi dan finansial dibawah mahkamah agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial⁴⁴.

⁴² Disarikan dari bagian penjelasan umum Undang-Undang No. 48 / 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 / 1986 tentang Peradilan Umum, hal 14

⁴³ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum UU No. 3/2006 tentang peradilan agama, hal 1 dan hal 18-19

⁴⁴ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang nomor 50 /2009 tentang peradilan agama, hal 1 dan hal 14-15

Pada Peradilan Tata Usaha Negara, pasca amandemen undang-undang dasar, diatur dalam undang-undang nomor 9 / 2004 yang *ratio legis* nya adalah sebagai konsekuensi logis-yuridis atas perubahan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang mahkamah agung serta terdapat aturan baru mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim PTUN⁴⁵. Kemudian pada tahun 2009, undang-undang PTUN tahun 2004 dirubah ke undang-undang nomor 51 / 2009, *Ratio legis* dari perubahan kedua undang-undang ini adalah untuk menegaskan dasar peraturan dalam peradilan tata usaha negara bahwa urusan teknis yudisial dan non yudisial seperti organisasi, finansial, dan administrasi dibawah naungan Mahkamah Agung Penguatan fungsi pengawasan, memperketat syarat-syarat pengangkatan hakim, pengaturan pengadilan khusus dan hakim ad hoc, dsb⁴⁶.

***Ratio legis* dari undang-undang Komisi Yudisial.** Undang-undang nomor 22 / 2004 tentang komisi yudisial menerangkan bahwa *ratio legis* dari undang-undang ini adalah sebagai respon atas ketentuan Pasal 24B ayat (4) yang menegaskan pentingnya peraturan pelaksana dari ketentuan konstitusi tersebut, dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula peran penting komisi yudisial dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui proses awal seleksi hingga pengusulan calon hakim agung kepada DPR, pengawasan eksternal serta pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial⁴⁷. Kemudian pada undang-undang tahun 2004 tersebut dirubah pada tahun 2011 dengan nomor 18 / 2011, *ratio legis* dari undang-undang yang baru ini adalah bahwa undang-undang nomor 22 / 2004 tentang komisi yudisial sudah tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan perubahan juga dilakukan untuk menjabarkan frasa “kewenangan lain” sebagai upaya penguatan tugas dan kewenangan komisi yudisial⁴⁸. Berkaitan dengan dengan *ratio legis* dari setiap undang-undang yang dipaparkan pada paragraf diatas, penulis akan memaparkan kewenangan pengangkatan hakim di setiap muatan materi dari beberapa undang-undang diatas sebagaimana berikut ini :

⁴⁵ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang nomor 9 / 2004 tentang PTUN hal 14-15

⁴⁶ disarikan dari penjelasan umum undang-undang nomor 51 / 2009 tentang PTUN, hal 17

⁴⁷ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum uu nomor 22 / 2004 tentang komisi yudisial, hal 1 dan hal 13-14

⁴⁸ disarikan dari konsiderans dan penjelasan umum undang-undang nomor 18 / 2011 tentang komisi yudisial, hal 1 dan hal 20

Tabel Kewenangan Pengangkatan Hakim dari beberapa UU

Undang-Undang	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Undang-Undang Dasar	Pasal 25, syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan Undang-Undang	<p>- Pasal 24A ayat (3), Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>-Pasal 24B ayat (1), KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim</p> <p>-Pasal 25, syarat untuk diangkat dan berhenti menjadi hakim diatur dalam ketentuan undang-undang.</p>
Kekuasaan Kehakiman	<p>- Pengangkatan hakim diatur pada undang-undang tersendiri (Pasal 12 UU 19/1964) yakni undang-undang tentang peradilan umum dan mahkamah agung no. 13/1965.</p> <p>- Pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Kepala Negara (Pasal 31, UU 14/1970)</p> <p>- Pada UU 35/1999 tidak diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim</p>	<p>- Pasal 34, seleksi dan pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial dan diatur dalam undang-undang. (UU No.4/2004)</p> <p>- Pengangkatan hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial dan kemudian dipilih oleh DPR (Pasal 32, UU No.49/2009)</p> <p>**dari muatan materi dua pasal undang-undang tersebut diatas, hanya menyebutkan kewenangan KY dalam pengangkatan hakim agung saja.</p>
Mahkamah Agung	- Hakim (tingkat pertama) diangkat oleh menteri kehakiman atau Presiden	-Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon hakim agung yang

	<p>atas usul ketua MA (Pasal 3 ayat (1) huruf B, UU No. 13/1965).</p> <p>-Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR-GR melalui Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman (Pasal 43 ayat (1) UU No.13/1965)</p> <p>- Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usulan DPR, pengajuan nama calon hakim agung diajukan DPR setelah mendengar pendapat MA dan Pemerintah (Pasal 8 UU No.14/1985)</p>	<p>diajukan oleh DPR dimana calon hakim agung tersebut diusulkan oleh KY dan kemudian dipilih oleh DPR untuk diajukan DPR ke Presiden (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/2004)</p> <p>- DPR memilih dan mengajukan calon hakim agung kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung, DPR mendapat nama calon hakim agung dari usulan Komisi Yudisial. (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 3 / 2009).</p>
Peradilan Umum	<p>- Pada pengadilan negeri, Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 /1986</p> <p>-Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri kehakiman dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung sedangkan untuk ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas persetujuan ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 ayat (1) UU No.2/1986)</p>	<p>- Untuk dapat dijadikan hakim pengadilan negeri harus berasal dari pegawai negeri yang syarat-syaratnya tercantum pada ayat (1) (Pasal 14 ayat (2) UU No. 8/2004)</p> <p>- Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung sedangkan untuk ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8/2004).</p> <p>-Proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama MA dan KY (Pasal 14A ayat (2) UU No.49/2009)</p>

		-Hakim Pengadilan umum diangkat oleh Presiden atas usul ketua MA dan diberhentikan atas usul MA dan/atau KY melalui ketua MA oleh Presiden. (Pasal 16 ayat (1) dan (1a) UU No. 49 / 2009)
Peradilan Agama	<p>- pengangkatan hakim pengadilan agama harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 7 /1989</p> <p>-Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri agama dan persetujuan ketua Mahkamah Agung sedangkan untuk ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat oleh menteri agama dengan persetujuan ketua mahkamah agung (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 /1989).</p>	<p>-Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pengawai negeri yang berasal dari calon hakim (Pasal 13 ayat (2) UU No. 3 / 2006)</p> <p>-Hakim Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung sedangkan untuk ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.(Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No.3/2006)</p> <p>-Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh MA dan KY (Pasal 13A ayat (2) UU No. 50 /2009)</p> <p>- Atas usulan ketua MA calon hakim pengadilan agama diangkat menjadi hakim pengadilan agama oleh Presiden sedangkan untuk pemberhentian dilakukan oleh Presiden atas usul MA dan/atau KY melalui ketua MA (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 50 / 2009).</p>
Peradilan Tata Usaha Negara	-Calon hakim PTUN wajib memenuhi persyaratan	- Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus

	<p>yang termaktub pada Pasal 14 ayat (1) UU No.5/1986 untuk dapat diangkat menjadi hakim PTUN.</p> <p>-Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul menteri kehakiman dan dengan persetujuan ketua MA (Pasal 16 ayat (1) UU No.5 /1986)</p>	<p>pegawai negeri yang berasal dari calon hakim (Pasal 14 ayat (2) UU No.9/2004)</p> <p>-Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara berdasarkan usul ketua Mahkamah Agung dan untuk ketua serta wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung. (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU No.9 / 2004)</p> <p>-perubahan kedua UU PTUN menyisipkan Pasal 14A yang menyatakan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama oleh MA dan KY (Pasal 14A ayat (2) UU No.51/2009)</p> <p>- Atas usul ketua MA, calon Hakim PTUN diangkat oleh Presiden dan dapat diberhentikan atas usul ketua MA dan/atau KY melalui ketua MA oleh Presiden.(Pasal 16 ayat (1) dan ayat (1a) UU No. 51/2009)</p>
Komisi Yudisial	<p>Belum ada pengaturan undang-undang tentang komisi yudisial</p>	<p>- Pasal 13 huruf A, komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR (UU 22/2004)</p> <p>- Pasal 13 huruf A, komisi yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc mahkamah agung</p>

		kepada DPR untuk dipilih dan diajukan kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc. (UU 18/2011)
--	--	---

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa sejak berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 setelah dekrit 5 Juli 1959 terjadi dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif khususnya dalam bidang seleksi dan pengangkatan hakim sebagai contoh ikut sertanya DPR dalam pengusulan calon hakim agung (Pasal 8 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung), keikutsertaan menteri dalam pengangkatan hakim tingkat pertama (Pasal 16 UU No.2 /1986) yang kemudian pasca reformasi dinamika tersebut muncul dari internal lingkup kekuasaan kehakiman itu sendiri yakni dengan adanya dua lembaga baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dinamika internal yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah perihal beberapa kewenangan Komisi Yudisial yang “bertemu” dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan ditengahi oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD 1945. Seperti yang sudah penulis paparkan di awal pembahasan bahwa penulisan ini terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, maka setelah pembahasan dari perspektif pendekatan perundang-undangan, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan dari sudut pandang *ratio decidendi* Hakim mahkamah yang akan dipaparkan pada poin selanjutnya.

B) Kewenangan Komisi Yudisial dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 43/PUU-XIII/2015 dan implikasinya.

Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim merupakan muara dari berbagai keterangan para pihak dan para ahli yang telah diterima oleh majelis hakim dalam persidangan sebelum memberikan putusan atas dalil permohonan pemohon. Dari keterangan-keterangan yang dibaca dan didengar oleh hakim mahkamah baik dari pihak pemohon (pengurus pusat IKAHI), keterangan dari Presiden dan dari DPR, serta dari pihak terkait seperti Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA),

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) serta setelah mendengarkan keterangan para ahli dari masing-masing pihak yang hadir mengikuti persidangan, maka berikut ini adalah pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi (dalam uraian ini pembahasan langsung pada pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan):

1. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan permohonan dengan alasan berikut ini:
 - 1.1 ketentuan pada pasal-pasal *a quo* yang pada pokoknya mencantumkan keikutsertaan komisi yudisial pada proses rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
 - 1.2 Konteks kemerdekaan di bidang kekuasaan kehakiman tidak hanya dalam konteks yudisial saja akan tetapi juga dalam proses rekrutmen hakim sehingga proses rekrutmen berkualitas secara independen dan mandiri sehingga adanya keikutsertaan komisi yudisial dalam proses rekrutmen hakim dapat menjadi pintu untuk intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
 - 1.3 Bahwa rumusan Pasal-Pasal *a quo* yang menyangkut keterlibatan komisi yudisial dalam rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama berdampak pada ketidakpastian hukum.
2. Menimbang, setelah mahkamah (majelis hakim konstitusi) memeriksa dengan seksama dalil-dalil permohonan para pengurus IKAHI, keterangan dari pihak eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan pihak terkait komisi yudisial, pihak terkait mahkamah agung, pihak-pihak terkait lainnya serta menyimak keterangan para ahli dari masing-masing pihak dan kesimpulan tertulis para pihak, maka mahkamah berpandangan sebagai berikut :

A. Perihal kekuasaan kehakiman yang merdeka

- 2.1 Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Tolak ukur bahwa prinsip tersebut dijalankan adalah sejauhmana undang-undang memberikan jaminan kekuasaan kehakiman, seperti yang tercantum pada Pasal 24 ayat (1) yang inti dari muatan materi Pasal tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang

merdeka terdapat pada kemandirian hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara. Oleh karena itu untuk menjamin terwujudnya kemandirian hakim maka diperlukannya kelembagaan yang mandiri sehingga para hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2.2 Bahwa melihat dari fakta sejarah bahwa sebelum amandemen konstitusi, undang-undang sebagai pelaksana dari konstitusi, pernah membuat kekuasaan kehakiman pada masa lalu berjalan dalam pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain walaupun amanat dalam konstitusi yakni Pasal 24 tidak menghendaki demikian.

2.3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, tahun 1970 disahkan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yakni UU No. 14 / 1970 sebagai pengganti undang-undang nomor 19 / 1964 yang menegaskan dasar adanya pembagian dalam lingkungan peradilan berdasarkan jenis-jenis peradilan namun hal itu tidak membawa perubahan yang cukup signifikan karena dalam bidang non teknis yudisial (organisasi, administrasi, dan finansial) tetap berada dalam naungan pihak eksekutif seperti kementerian agama bagi peradilan agama dan kementerian kehakiman bagi peradilan negeri serta peradilan tata usaha negara.

2.4 Bahwa terjadinya reformasi tahun 1998 memunculkan beberapa tuntutan yang salah satunya adalah tuntutan reformasi bidang peradilan yakni kekuasaan kehakiman yang merdeka dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan yang lain dan hal ini termasuk dalam bidang non teknis yudisial seperti organisasi, administrasi dan finansial. Tindak lanjut dari tuntutan itu adalah dengan disahkannya undang-undang nomor 35 / 1999 yang mengatur tentang perubahan beberapa pasal dari undang-undang nomor 14 / 1970 dan kemudian perubahan ini menjadi titik awal munculnya sistem peradilan satu atap yakni terhimpunnya teknis yudisial dan non teknis yudisial dalam mahkamah agung. Dan kemudian sistem peradilan satu atap terwujud ketika terjadi amandemen undang-undang dasar 1945 pada tahun 2001 Pasal 24 kemudian berimplikasi pada perubahan undang-undang pelaksana, yakni disahkannya undang-undang nomor 4 / 2004 yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 48 / 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut diatas, mahkamah (para majelis hakim konstitusi) berpendapat bahwa sistem peradilan yang diinginkan oleh konstitusi tidak hanya menegakkan hukum namun juga menegakkan keadilan. Dengan sistem dan mekanisme mandiri tersebut maka para pihak terlindungi untuk mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara.

B. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial

3. Menimbang bahwa pada ketentuan UU Kekuasaan kehakiman No.48 tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa segala keikutsertaan pihak diluar pada kegiatan peradilan adalah dilarang kecuali diatur dalam undang-undang dasar 1945.

3.1 Bahwa komisi yudisial adalah lembaga negara yang ditetapkan dalam amandemen UUD 1945, termaktub pada Pasal 24B dimana tugas dan kewenangannya tertulis pada ayat (1) yang intinya adalah bahwa komisi yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

3.2 Bahwa frasa “wewenang lain....” di dalam Pasal 24B ayat (1) telah ditafsirkan oleh mahkamah sebagaimana tertulis dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 yakni pengawasan Komisi Yudisial dalam batas-batas tertentu dalam hal ini adalah pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim dan bukan pengawasan terhadap lembaga peradilan sehingga lembaga peradilan dalam melaksanakan wewenang yudisialnya tidak dapat diawasi oleh lembaga lainnya. Kemudian mengenai pemaknaan komisi yudisial mengawasi hakim pada frasa “...dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan.....” telah ditafsirkan dan dipraktekkan sebagai pengawasan justisial dengan cara memeriksa putusan padahal yang seharusnya dilakukan komisi yudisial adalah hanya pengawasan etik karena norma pengawasan yang berlaku secara universal dalam dunia peradilan adalah lembaga lain tidak bisa serta menilai suatu putusan, lembaga lain hanya bisa menilai suatu putusan bila sudah melalui prosedur

hukum sesuai dengan hukum acara yang ditentukan. Pada putusan tahun 2006 tersebut, mahkamah mempertimbangkan pengaturan Komisi Yudisial dalam bab kekuasaan kehakiman yang menunjukkan bahwa KY adalah lembaga negara dalam lingkup kekuasaan kehakiman walaupun bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengaturan Pasal 24A ayat (3) yang menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan oleh Presiden, menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan keberadaan KY berhubungan dengan MA. Kemudian menurut mahkamah karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman akan tetapi sebagai lembaga komplementer yang tugasnya *mensupport* kekuasaan kehakiman.

3.3 Bahwa pada saat persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban pihak terkait yakni komisi yudisial pada tanggal 8 Juni 2015 terhadap pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana berikut ini :

Bahwa dalam rapat panitia Ad Hoc I BP MPR terkait dengan kewenangan KY dalam melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung disampaikan oleh tiga anggota dari fraksi PDI-P yakni Harjono, Jacob tobing, dan Pataniari siahaan yang secara garis besar menyatakan bahwa perlu adanya lembaga diluar mahkamah agung untuk melakukan seleksi hakim tidak hanya pada hakim agung namun juga pada hakim tingkat pertama dan tingkat kedua. Kemudian Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M ahli yang dihadirkan oleh forum kajian hukum dan konstitusi menyampaikan bahwa fraksi PDI-P yang paling getol menyampaikan perlunya KY dalam proses rekrutmen hakim hingga tingkat daerah dengan melibatkan unsur tertentu seperti akademisi dan praktisi hukum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna yang pada saat itu merupakan anggota fraksi PDI-P.

3.4 Bahwa ahli dari IKAHI (pemohon) yakni Prof. Dr, Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc. memberikan keterangan bahwa betul sewaktu pembahasan amandemen UUD 1945 dibahas mengenai kemungkinan KY ikut berperan dalam proses rekrutmen calon hakim tingkat pertama dan tingkat kedua

akan tetapi usulan-usulan tersebut tidak mendapat sepakat dari mayoritas anggota rapat panitia Ad Hoc I dan pada sidang paripurna MPR sehingga rumusan kewenangan seleksi hakim yang disetujui anggota rapat adalah pada proses seleksi hakim agung saja.

3.5 Bahwa usulan dan pendapat mengenai keterlibatan KY dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama dan hakim tingkat kedua ditolak dalam Sidang Panitia Ad Hoc dan sidang Paripurna MPR. Maka mahkamah berpendapat bahwa usulan yang ditolak dalam rapat tersebut tidak dapat dijadikan norma dalam undang-undang.

4. Menimbang bahwa legislator tidak dapat memperluas pemaknaan kalimat “wewenang lain” yang tercantum dalam muatan materi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena konstitusi tidak memberikan wewenang kepada legislator untuk menafsirkan lain kalimat tersebut, sehingga kalimat “wewenang lain” hanya mencakup menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
5. Menimbang bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam proses seleksi hakim di peradilan tingkat pertama walaupun tidak disebutkan secara tersurat dalam Pasal 24 namun pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa peradilan tingkat pertama tersebut diatas berada dalam naungan Mahkamah Agung dan hal ini berkaitan pula dengan sistem penyatuatan peradilan yang menurut mahkamah berarti seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama adalah wewenang Mahkamah Agung.
6. Berdasarkan pertimbangan diatas, mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal *a quo* sepanjang kalimat “bersama” dan kalimat “dan komisi yudisial” adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
7. Berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas, mahkamah berpandangan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum.

Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, mahkamah membacakan amar putusannya pada tanggal 26 Agustus 2015 yang pada intinya adalah sepanjang frasa “bersama” dan frasa “komisi yudisial” pada pasal-pasal *a quo* ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian pada ayat (2) terjadi perubahan redaksi yang baru

menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”. Namun dalam putusan tersebut pula terdapat *dissenting opinion* dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang secara garis besar menyampaikan bahwa isu utama dari permohonan pemohon adalah untuk menemukan batas konstitusional dari kewenangan komisi yudisial dari frasa “...wewenang lain,.....” yang termaktub pada Pasal 24B ayat (1) sehingga dengan ditemukannya batas konstitusional tersebut dapat melindungi prinsip kekuasaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bila dirumuskan dalam pertanyaan “Apakah proses seleksi hakim yang dilakukan bersama-sama dengan komisi yudisial menyebabkan terganggunya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945?”.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik yang termaktub pada UUD 1945 maupun yang berkali-kali dikukuhkan dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun karena kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah penyangga utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu, terwujudnya penyatuatan bidang organisasi, finansial, dan administrasi kepada Mahkamah Agung yang didasari oleh TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang kemudian dalam ranah kekuasaan kehakiman dielaborasi kedalam UU No. 35 /1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman adalah hal yang benar. Sehingga dalam permohonan *a quo* dapat memunculkan pertanyaan yakni “apakah keikutsertaan komisi yudisial dalam proses rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama mengganggu ranah organisasi, administrasi, dan finansial dari tiga badan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung?”. Atas pertanyaan tersebut beliau berpandangan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak mengganggu ranah organisasi, administrasi, dan finansial sepanjang keikutsertaan Komisi Yudisial dalam konteks pemberian pengetahuan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya komisi yudisial sebelum adanya judicial review ini sudah terlibat dalam pengajaran kode

etik dan pedoman perilaku hakim, mengawasi jalannya diklat calon hakim serta turut berperan dalam penentuan kelulusan bagi para calon hakim yang telah menjalani masa pendidikan dan latihan calon hakim. Oleh karena itu menurut beliau, hal tersebut diatas merupakan penafsiran serta implementasi yang tepat terhadap frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan.....” diamanahkan kepada komisi yudisial. Penafsiran yang seperti ini dilihat konstitusional karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun kurang harmonisnya hubungan mahkamah agung dan komisi yudisial sebagaimana tampak dari pemberitaan di media elektronik maupun media cetak, telah mengakibatkan sirnanya harapan bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan terjaganya maruah para hakim. Pada akhir penyampaian *dissenting opinion*nya beliau mengemukakan pendapatnya bahwa mahkamah seharusnya memutuskan dan menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil *a quo* adalah konstitusional bersyarat dan pemaknaan keterlibatan komisi yudisial dalam proses seleksi hakim tingkat pertama adalah dalam konteks pengajaran materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim dalam proses seleksi itu⁴⁹.

. Dari pemaparan *ratio decidendi* diatas, penulis mengemukakan pendapat yaitu, pasal-pasal *a quo* (Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dihadapkan pada Pasal 24A ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) maka alasan keterangan ahli pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* sebagai bentuk penggunaan *open legal policy* oleh legislator⁵⁰ adalah benar dan hal tersebut (penggunaan *opened legal policy*) menurut penulis tidak dapat dibenarkan karena konstitusi (Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1)) telah mengatur secara rigid mengenai wewenang rekrutmen hakim tersebut dan perihal frasa dalam Pasal 24B ayat (1) “...wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” ini secara gramatikal tidak bisa diperluas bagi calon hakim atau seseorang

⁴⁹ Disarikan dari putusan mahkamah konstitusi nomor 43/PUU-XIII/2015 hal 113-128

⁵⁰ disampaikan oleh ahli dari pihak pemohon, tercatat dalam putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 hal 20-23

yang akan atau sedang mengikuti seleksi CPNS calon hakim, karena frasa “...wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan....” ini adalah frasa yang mengatur tentang pengawasan dan berlaku pada orang yang telah sah diangkat menjadi hakim. Kemudian alasan lainnya adalah baik pada undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang komisi yudisial, tidak ada pencantuman satu pasal pun kewenangan KY dalam rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama sehingga tidak ada satupun kewenangan komisi yudisial yang dikurangi oleh mahkamah konstitusi, yang ada adalah Mahkamah Konstitusi melakukan tertib hukum, melakukan tertib hierarki peraturan perundang-undangan dengan putusan tersebut. Niat baik dalam perumusan muatan materi namun kurang memperhatikan aturan yang terdapat dalam undang-undang lembaga lain yang terkait, maka akan menyebabkan sengkabut antar peraturan. Oleh karena itu apabila legislator hendak memberikan kewenangan rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama kepada KY maka pencantuman kewenangan tersebut tidak hanya berada pada undang-undang yang mengatur peradilan tingkat pertama saja namun juga harus ada pada undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang mahkamah agung, dan undang-undang komisi yudisial. Hal ini perlu dilakukan untuk selarasnya muatan materi disetiap undang-undang pada lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya atas dalil permohonan pemohon, DPR menyampaikan bahwa Pasal-Pasal *a quo* merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 25 UUD 1945 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan menjadi hakim, menurut pandangan penulis argumen tersebut tidak tepat karena Pasal-Pasal *a quo* tidak memuat syarat atau ketentuan untuk diangkat menjadi hakim dan diberhentikan dari jabatan hakim, muatan materi pada Pasal-pasal *a quo* lebih kepada penunjukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melaksanakan pengangkatan hakim secara bersama-sama sedangkan pengaturan syarat-syarat pengangkatan hakim didalam UU sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 25 UUD 1945 diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU peradilan agama No. 7 Tahun 1989, dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pengaturan untuk pemberhentian hakim diatur pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian implikasi dari dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada Pasal 14 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) UU Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) UU PTUN serta terjadi perubahan redaksi pada Pasal 14 ayat (3) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) UU Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (3) UU PTUN yakni pengaturan lebih lanjut mengenai proses seleksi hakim diatur oleh Mahkamah Agung saja. Tindak lanjut dari putusan tersebut adalah dengan ditetapkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Sehingga saat ini Komisi Yudisial dapat berfokus pada tugas rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* serta pengawasan eksternal sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial adalah pengawasan dalam terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti yang tertulis pada surat keputusan bersama MA RI dan KY RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari sepuluh poin yakni : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Poin tersebut kemudian ditegaskan pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang intinya menyampaikan bahwa kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan bagi para hakim ketika

menjalankan tugas profesinya dan ketika berada pada lingkungan masyarakat secara umum diluar kedinasan”⁵¹.

C. Komisi Yudisial Indonesia dan Komisi Yudisial Negara lain dalam perspektif pendekatan komparatif.

Pembentukan lembaga komisi yudisial tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara juga mendirikan lembaga tersebut dinegaranya, studi komparatif ini bukan mencari tahu siapa yang lebih unggul dari siapa akan tetapi untuk mencari suatu refleksi positif sehingga muncul gagasan baru yang baik untuk komisi yudisial republik indonesia dimasa yang akan datang, beberapa negara yang memiliki lembaga komisi yudisial adalah :

1. Komisi Yudisial Prancis⁵²

1.1 Kekuasaan Kehakiman di Prancis

Sistem ketatanegaraan negara Prancis hampir sama dengan Indonesia yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun begitu, Prancis menganut sistem presidensial karena terdapat Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan disamping Presiden. Sistem peradilan di negara ini tidak satu atap seperti di Indonesia karena kewenangan administrasi, organisasi, finansial peradilan dibawah Departemen Kehakiman Prancis sedangkan Pengadilan hanya membawahi urusan teknis yudisial saja. Penunjukan hakim dilakukan oleh *High Council of Judiciary* . Dalam sistem pengawasan pengadilan dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda, seperti :

- a) Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang mengawasi secara langsung;
- b) Parlemen melakukan pengawasan pengadilan secara tidak langsung pada ranah anggaran secara umum;

⁵¹ Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁵² Tim penyusun Sekretariat Komisi Yudisial, USAID, dan JPIP. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. 2014), hal 97-100

- c) Pengawasan yang dilakukan oleh publik dalam ranah kinerja kementerian dan pelaksanaan tanggung jawabnya, pengawasan ini dilakukan dalam forum di Parlemen;
- d) Dinas Inspeksi sebagai bagian dari Departemen kehakiman melakukan inspeksi dalam ranah administrasi, kedisiplinan hakim dan juga inspeksi apabila ada aduan dari masyarakat.

1.2 Komisi Yudisial di Prancis

Pada tahun 1958 Prancis dibentuk komisi yudisial Prancis yang bernama *Conseil Supérieur De La Magistrature*. Dalam hierarki ketatanegaraan, lembaga ini berada dibawah Presiden yang secara khusus membantu Presiden dalam mewujudkan independensi peradilan. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena kekhawatiran terhadap akuntabilitas peradilan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap lembaga peradilan dari pihak luar lingkup kekuasaan kehakiman Prancis. *Conseil Supérieur De La Magistrature* atau komisi yudisial diatur dalam dua pasal yakni Pasal 64 yang pada intinya adalah Presiden menjamin independensi peradilan dan Pasal 65 yang berisi tentang kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial seperti pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan pendisiplinan hakim. Mengenai struktur organisasi komisi yudisial di Prancis ini, dipimpin oleh Presiden secara *ex-officio* , di wakili oleh Menteri kehakiman dan para anggotanya. Lebih rinci mengenai hal tersebut di paparkan berikut ini :

- a) Presiden sebagai Ketua (secara *Ex-officio*);
- b) Menteri Kehakiman sebagai Wakil ketua (secara *Ex-officio*);
- c) Satu orang dari Senat;
- d) Satu orang dari *Assemblée nationale*;
- e) Satu orang dari *Conseil d'Etat*;
- f) Satu orang dari *Cour de Comptes*;
- g) Enam orang diangkat oleh *Sitting Magistrate* dengan sistem perwakilan;
- h) Enam orang diangkat oleh kejaksaan melalui sistem perwakilan.

2. Komisi Yudisial Belanda⁵³

A. Kekuasaan Kehakiman Belanda

Kerajaan Belanda mengatur kekuasaan kehakiman dalam konstitusinya di bab VI tentang administrasi peradilan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pemegang kuasa tertinggi dalam bidang peradilan dan membawahi Pengadilan Banding, Pengadilan Distrik yang terdiri dari Pengadilan sub distrik, Pengadilan perdata, Pengadilan pidana, dan Pengadilan tata usaha negara. Di kerajaan belanda juga terdapat Pengadilan Khusus yang terdiri dari *Central Appeals Tribunal*, *Trade and industry appeals tribunal*, dan *Administration jurisdiction division of the council state*.

Jumlah Hakim Agung di Belanda 30 orang dan pada tahun 2002 terjadi program reorganisasi sistem peradilan yakni sistem peradilan manajemen terpadu peradilan dan pembentukan komisi yudisial.

B. Komisi Yudisial Belanda

Komisi yudisial di Belanda disebut dengan *Raad Voor de rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* yang resmi dibentuk pada 1 Januari 2011. Jajaran kepemimpinan komisi yudisial Belanda ada empat orang yang berasal dari usulan kementerian hukum dan disetujui kerajaan Belanda dengan rincian dua orang berlatar belakang hukum dan dua orang yang lainnya berlatar belakang bukan hukum. Jajaran pimpinan lembaga ini bertugas selama enam tahun dan didukung oleh 140 orang staff. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Belanda seperti yang diatur dalam Bab II tentang Komisi Yudisial, Pasal 91 yang mengatur tentang wewenang komisi yudisial adalah :

a) Tugas wajib / *statutory task* :

- Persiapan anggaran peradilan;
- Pengalokasian dana kepada peradilan;
- Dukungan operasional;
- Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi;
- Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum;
- Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru.

⁵³ Tim penyusun Sekretariat Komisi Yudisial, USAID, dan JPIP. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. 2014), hal 86-91

b) Tugas lainnya / *Non-statutory task*:

- Juru bicara lembaga peradilan;
- Kerjasama internasional.

3. Komisi Yudisial Negara Bagian Winconsin-Amerika Serikat⁵⁴

A. Kekuasaan Kehakiman Winconsin

Amerika Serikat sebagai negara federal, pada setiap negara bagian tentu memiliki konstitusi dan cabang kekuasaan sendiri. Kekuasaan kehakiman pada negara bagian winconsin diatur dalam *winconsin statuta*, *article VII Judiciary* (Pasal VII bagian Peradilan). Terdapat empat badan peradilan dalam sistem peradilan winconsin, antara lain : Mahkamah Agung winconsin, Pengadilan tingkat banding, Pengadilan sirkuit, dan Pengadilan kota/Pengadilan tingkat pertama.

Pengaturan komisi yudisial winconsin juga terdapat pada pasal tersebut diatas namun tidak memiliki kewenangan yudisial akan tetapi memiliki kewenangan dalam rangka efektifitas penegakan hukum sedangkan kewenangan dari Mahkamah Agung winconsin seperti yang tertuang pada Pasal VII bagian 3 (terjemahan) adalah :

- (1) Mahkamah Agung memiliki otoritas / kekuasaan dalam bidang pengawasan administrasi pada semua lembaga peradilan;
- (2) Mahkamah Agung yang membawahi seluruh lembaga peradilan banding dapat mendengarkan/mengetahui keterangan dari kejadian yang sesungguhnya dan mendengarkan/mengetahui catatan-catatan persidangan. Mahkamah agung dapat mengeluarkan surat perintah yang diperlukan guna membantu wewenang yurisdiksinya;
- (3) Mahkamah agung dapat meninjau putusan-putusan dan atas permintaan pengadilan banding, dapat memindahkan kasus dari pengadilan banding dan dapat menerima kasus yang sedang di verifikasi oleh pengadilan banding.

Keanggotaan Mahkamah Agung winconsin terdiri dari tujuh orang yang ditunjuk dan diangkat oleh gubernur dan wewenang pemberhentian dimiliki oleh legislatif.

⁵⁴ Tim penyusun Sekretariat Komisi Yudisial, USAID, dan JPIP. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. 2014), hal 75-86

B. Komisi Yudisial Winconsin

Mahkamah Agung mendirikan lembaga etik pada tahun 1971 dengan nama *Judicial conduct organization*. Tugas dari lembaga ini adalah untuk mendisiplinkan hakim yang melakukan kegiatan yang diindikasikan dapat berefek buruk pada peradilan di bidang administrasi dan kepercayaan masyarakat. Pada tahun 1977 terjadi perubahan (amandemen negara bagian Winconsin) pada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap badan peradilan atau hakim harus patuh pada bentuk sanksi berupa teguran tertulis, peringatan, skorsing, hingga pemecatan karena melanggar kode etik maupun ketidakcakapan hakim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Tindak lanjut dari ketentuan tersebut adalah di tahun 1978 Parlemen winconsin mendirikan lembaga komisi yudisial yang disebut *Winconsin Judicial Commission* sebagai lembaga independen dari Mahkamah Agung yang dalam konstitusi diatur dalam Lampiran G Konstitusi negara bagian winconsin (*Winconsin Statutes*). Keanggotaan lembaga ini terdiri dari sembilan orang dengan rincian Mahkamah Agung menunjuk empat orang berlatarbelakang pendidikan hukum yakni hakim dan advokat dan Gubernur menunjuk lima orang yang berlatarbelakang non hukum dengan persetujuan parlemen (senat) dengan masa jabatan tiga tahun. Penggantian dan pemberhentian anggota dilakukan atas usul Ketua Mahkamah Agung atau Gubernur dengan persetujuan Ketua Komisi Yudisial.

Tugas utama komisi yudisial winconsin adalah menerima aduan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim dan menindaklanjutinya, hal ini terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka penegakan disiplin hakim. Beberapa bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran kode etik adalah kesalahan yang disengaja dan berkelanjutan ketika menjalankan tugas-tugas resmi, perbuatan tindak pidana, ketidakcakapan dalam pengendalian diri dari hal-hal yang dapat mengganggu kinerja seperti penggunaan narkoba dan minuman keras, dan melaksanakan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga kuat memiliki kekurangan permanen (kesehatan) yang dapat mengganggu kinerja. Penegakan disiplin dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan investigasi dan tahapan adjudikasi. Kemudian proses penanganan pengaduan dilakukan dengan tahapan seperti : menerima aduan, evaluasi pendahuluan, dismissal prosedur, dan pemeriksaan materi pengaduan. Setelah tahapan aduan tersebut selesai maka komisi

yudisial winconsin dapat melakukan tindakan : Mengabaikan aduan dengan alasan daluarsa dan menolaknya; Merujuk kembali masalah tersebut untuk penyedilkan tambahan; Memberikan teguran atau peringatan kepada hakim; Menindaklanjuti aduan secara formal melalui permohonan di Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial Winconsin bekerjasama dengan lembaga negara lain yakni pemerintah, parlemen, dan Mahkamah Agung, dalam hal : Pemilihan anggota; Pertanggungjawaban kinerja; Pemberhentian; Saran pengawasan; Pelaporan hasil investigasi dan adjudikasi yang dilaksanakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, laporan ini diserahkan kepada Mahkamah Agung.

4. Studi Komparatif Komisi Yudisial Indonesia dan Komisi Yudisial Negara lain

A. Dasar Pengaturan⁵⁵, dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Indonesia dan Prancis mengatur keberadaan KY dalam konstitusi negara sedangkan Belanda dan negara bagian Winconsin-Amerika serikat tidak mengatur lembaga tersebut dalam konstitusinya.

B. Tugas dan wewenang⁵⁶,

(1) Belanda : seleksi calon hakim dan pengangkatannya, pelatihan dan pendidikan hakim, pengelolaan anggaran peradilan, pengelolaan manajemen dan administrasi, dan rekomendasi kebijakan peradilan.

(2) Prancis : seleksi calon hakim dan pengangkatannya, mutasi dan promosi hakim, wewenang pendisiplinan, dan rekomendasi kebijakan peradilan.

(3) Negara bagian Winconsin-Amerika serikat : kewenangan pendisiplinan

(4) Indonesia : seleksi calon hakim agung yang kemudian diusulkan kepada DPR untuk dipilih dan kemudian ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden dan sebagai lembaga pengawas eksternal

C. Keanggotaan Komisi Yudisial⁵⁷, KY Belanda beranggotakan empat orang, KY Prancis beranggotakan 18 orang, KY negara bagian winconsin beranggotakan sembilan orang, dan KY Indonesia beranggotakan tujuh orang.

⁵⁵ Tim penyusun Sekretariat Komisi Yudisial, USAID, dan JPIP. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. 2014), hal 106-107

⁵⁶ *Ibid*, hal 110-111

⁵⁷ *Ibid*, hal 113

Dari studi komparatif diatas, penulis belum menemukan pemaknaan yang secara konkrit dalam ranah independensi lembaga komisi yudisial disetiap negara tersebut.

2. Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman

Rekonstruksi kewenangan komisi yudisial dalam pandangan penulis dapat dilihat dari tiga cara, yang pertama adalah melakukan perubahan muatan materi konstitusi Pasal 24B ayat (1), perubahan dalam undang-undang Komisi Yudisial, dan pembaharuan sistem legislasi. Cara pertama yakni dengan adanya perubahan konstitusi, yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan nomenklatur kelembagaan dari komisi yudisial sehingga nanti tidak lagi sebagai lembaga komplementer / *auxiliary organ* serta perubahan muatan materi pada Pasal 24B ayat (1) yang pada intinya menerangkan bahwa komisi yudisial adalah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan calon hakim agung serta memiliki kewenangan lain pada konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dirubah redaksinya menjadi “Dewan pengawas eksternal kekuasaan kehakiman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang” . Diharapkan dengan perubahan muatan materi dari ayat tersebut memberikan ruang bagi pemuatan wewenang baru oleh legislator kepada komisi yudisial didalam undang-undang serta tidak akan dianggap *open legal policy* lagi dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia UUD 1945.

Cara kedua, perubahan materi muatan undang-undang yang dilakukan dalam program legislasi nasional. Perubahan materi undang-undang yang dimaksud yakni dengan opsi pertama melakukan perubahan kedua undang-undang dan opsi kedua mencabut dan kemudian mengganti dengan undang-undang yang baru. Melakukan opsi perubahan kedua yang dimaksud adalah perubahan kedua atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, poin yang dirubah yakni penambahan wewenang pada Pasal 13 yang termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial apabila perubahan nomenklatur tidak dilaksanakan. Penulis mengusulkan perubahan kedua adalah pada Pasal 13, legislator

menambahkan dua kewenangan baru yakni kewenangan komisi yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi hakim tingkat pertama dan mengawasi jalannya seleksi hakim tersebut serta ketentuan tersebut juga perlu dicantumkan pada undang-undang terkait seperti undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang mahkamah agung, dan undang-undang peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara. Sehingga tercipta harmoni dalam aturan undang-undang antar lembaga negara dalam lingkup kekuasaan kehakiman dan posisi komisi yudisial sebagai perwakilan rakyat dan pelaksana dalam pengawasan kekuasaan kehakiman dapat berjalan optimal. Kemudian yang dimaksud dengan opsi kedua yakni mencabut dan kemudian mengganti dengan undang-undang yang baru apabila usul perubahan nomenklatur direalisasikan maka legislator perlu membuat undang-undang yang baru beserta muatan materinya tentang Dewan Pengawas Eksternal Kekuasaan Kehakiman.

Cara yang ketiga yakni perubahan dalam sistem legislasi nasional, sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 46 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara garis besar menyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPR dilakukan pengharmonisasian dan pembulatan undang-undang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR dan Pasal 47 UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU yang diajukan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri atau kepala lembaga yang mengurus bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan yang dimaksud dalam proses legislasi ini (proses pengharmonisasian dan pembulatan undang-undang) adalah dengan diadakannya sistem *judicial preview* yang tujuannya untuk menganalisa rancangan undang-undang terhadap undang-undang dasar sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan terlepas dari pihak manapun yang mengajukan usul pembentukan atau perubahan undang-undang. Penerapan *judicial preview* ini seperti yang telah diterapkan oleh negara Prancis, yakni sebelum undang-undang organik diundangkan terlebih dahulu diajukan kepada

dewan konstitusi untuk dinilai apakah terdapat muatan materi yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak bertentangan dengan konstitusi⁵⁸.

Selain ketiga cara diatas, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pihak internal lembaga tersebut guna mengharmonisasikan hubungan antar kedua lembaga yakni dengan ditetapkan rencana strategis. Seperti yang dilakukan oleh MA yakni dengan menetapkan rencana strategis yang berlaku secara periodik. Pada naskah rencana strategis MA tahun periode 2020-2024 perihal hubungan kerjasama dengan KY, MA menekankan bahwa hubungan yang terjadi sebagai mitra dalam pengawasan akan dirumuskan kembali agar koordinasi dengan KY sebagai pengawas eksternal yang menerima aduan dari masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik untuk memperkecil kesalahpahaman antar lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain kerjasama dalam bidang pengawasan etik dan pengawasan penerapan pedoman perilaku hakim, MA dalam hal ini badan pengawasan merencanakan peningkatan kerja sama dengan KY dalam hal :

1. Melaksanakan pemeriksaan bersama atas aduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, guna terciptanya persamaan persepsi atas hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut;
2. Mengintegrasikan sarana teknologi informasi yang menampung aduan masyarakat yang disampaikan ke badan pengawas maupun KY sehingga tidak ada duplikasi dalam pemeriksaan;
3. Bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan kode etik dan perilaku hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan mengajak masyarakat untuk waspada terhadap mafia peradilan;
4. Database hakim terkoneksi langsung dengan badan pengawas dan KY dilakukan guna menyokong pelaksanaan pengawasan hakim secara bersama-sama baik pada hakim peradilan tingkat pertama maupun para hakim peradilan tingkat banding;
5. Melaksanakan pertemuan rutin guna mencapai rekonsiliasi atas dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat yang tidak bisa ditindak lanjuti

⁵⁸ M. Husni abadi, dkk. *Pemuatan Norma Hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta : penerbit Deepublish.2017) hal.43-44

oleh KY dalam hal dugaan penyimpangan yuridis dalam persidangan maupun pelaksanaan hukum acara⁵⁹.

VI. Kesimpulan

1. Implikasi dari putusan MK No.43/PUU-XIII/2015 adalah pasal-pasal *a quo* adalah bersifat *open legal policy* oleh karena itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada putusan tersebut dapat diketahui bahwa walau sekilas terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial akan tetapi yang sesungguhnya Mahkamah konstitusi tidak mengurangi wewenang pokok komisi yudisial karena pada undang-undang komisi yudisial tidak mengatur wewenang seleksi hakim tingkat pertama dan hanya mengatur wewenang seleksi calon hakim agung serta penegakan etik hakim dan pedoman perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi meluruskan aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi;
2. Oleh karena implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial dapat dilakukan melalui tiga cara yakni yang pertama adalah melakukan perubahan muatan materi konstitusi Pasal 24B ayat (1) pada nomenklatur lembaga komisi yudisial menjadi dewan pengawas eksternal kekuasaan kehakiman dan perubahan pada redaksi pasal tersebut menjadi “Dewan Pengawas Eksternal Kekuasaan Kehakiman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang”, cara kedua yakni melakukan opsi perubahan kedua dari undang-undang muatan materi undang-undang yakni dengan melakukan perubahan kedua bagi undang-undang komisi yudisial atau merubah muatan materi undang-undang secara keseluruhan dengan mencabut dan mengganti undang-undang dengan undang-undang yang baru, dan cara ketiga yakni pembaharuan sistem legislasi yaitu dalam proses pengharmonisasian dan pembulatan materi muatan pada rancangan undang-undang dilakukan *judicial preview* sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan.

⁵⁹ Tim penyusun renstra MA 2020-2024. *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024*. (Jakarta: Mahkamah Agung) hal 114

VII. Saran

1. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang kewenangannya kembali diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya melakukan perubahan muatan materi undang-undang dan/atau melakukan perubahan muatan materi pada undang-undang dasar terkait dengan nomenklatur serta tugas dan kewenangannya sebagai ikhtiar penguatan kedudukan lembaga pengawas eksternal kekuasaan kehakiman ini dan dalam pelaksanaan tugas serta kewenangannya dapat berjalan optimal .
2. Penerapan metode *judicial preview* dalam proses legislasi di negara Prancis perlu diadopsi di Indonesia guna semakin memastikan bahwa sebelum undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya disahkan sudah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi serta peraturan yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abadi, Husnu, dkk. 2017. *Pemuatan Norma Hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Isra, Saldi. 2015. *Sistem Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- JS Panjaitan, Marojahan. 2017. *Pembentukan dan Perubahan UUD 1945: sebagai bahan ajar ilmu perundang-undangan dan rancangan perundang-undangan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Maksudi, Beddy Irawan .2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud.2014.*Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sirajuddin dkk, 2016.*Legislative Drafting*. Malang:Setara Press
- Tim penyusun naskah komprehensif mahkamah konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Tim penyusun renstra MA 2020-2024, 2020. *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024*. Jakarta: Mahkamah Agung

Tim penyusun Sekretariat Komisi Yudisial, USAID, dan JPIP. 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Wahidin, Samsul.2007.*Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Keputusan Bersama 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015

